



Penggunaan Metode Technology Acceptance Model dalam Analisis E-Procurement di Pemprov Jawa Barat

Sarah Hana Fitriyah*

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 13/8/2022

Revised : 30/11/2022

Published : 21/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 147 - 156

Terbitan : **Desember 2022**

ABSTRAK

Pemerintah menggunakan teknologi untuk mereformasi pelayanan publik menjadi transparansi dan akuntabilitas melalui penciptaan e-Government. Contoh penerapan e-Government adalah pengadaan secara elektronik. Namun, kurangnya terdapat masalah ketidaksiapan sumber daya manusia dalam pengoperasian e-Procurement yang mempengaruhi efektivitas e-Government. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dan deskriptif dengan menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). Populasi dalam penelitian ini adalah Perangkat Daerah/Biro di Jawa Barat dengan sampel sebanyak 100 responden. Alat analisis menggunakan Partial Least Square SEM (PLS SEM). Peneliti menggunakan software SmartPLS 3.0. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa pengguna e-Procurement di Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam menggunakan e-Procurement.

Kata Kunci : E-Procurement; Pelayanan Publik; Structural Equation Model.

ABSTRACT

The government uses technology to reform public services into transparency and accountability through the creation of e-Government. An example of the application of e-Government is electronic procurement. However, there is a lack of unprepared human resources in the operation of e-Procurement which affects the effectiveness of e-Government. This research method is quantitative and descriptive using the Technology Acceptance Model (TAM). The population in this study is the Regional Apparatus/Bureau in West Java with a sample of 100 respondents. The analysis tool uses Partial Least Square SEM (PLS SEM). Researchers used the SmartPLS 3.0 software. Based on the results of the analysis, it is known that e-Procurement users in the West Java Provincial Government indicate that they have difficulty using e-Procurement

Keywords : e-Procurement; Public Service; Structural Equality Model.

© 2022 Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Pemerintah merupakan badan publik yang memiliki peran penting sebagai lembaga penyedia layanan sipil dan jasa-jasa publik dalam meningkatkan mutu pelayanan publik demi terciptanya clean and good governance. Pada hakekatnya yang menunjukkan bagaimana fungsi pemerintahan dijalankan adalah dengan disediakannya pemberian pelayanan baik atas barang, jasa dan pelayanan administrasi kepada setiap warga. Fungsi penting pemerintah yaitu sebagai regulasi, proteksi dan sebagai distribusi (Endah, 2018).

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan tersebut, dibutuhkan logistik, peralatan dan jasa untuk menunjang optimalnya kegiatan pemerintah (Purba & Arifin, 2020). Untuk memenuhi berbagai kebutuhan diatas perlu dilakukan melalui tender atau pelelangan. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari, Tahap Perencanaan, Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Serah Terima Pekerjaan (Azikin et al., 2021). Melalui tahapan tersebut pengajuan PBJ dirancang setiap tahunnya dalam rencana keuangan yang disusun melalui adanya usulan setiap daerah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang bertujuan untuk meminimalisir hal merugikan seperti kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan dapat dihindari.

Dalam pelaksanaan APBN dan APBD, terdeteksi permasalahan yang seharusnya anggaran tersebut lebih banyak dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan lainnya, justru terkuras di dalam kegiatan PBJ yang tidak efektif dan efisien (Rachmania, 2020). Hal tersebut bisa dilihat dari seringnya terjadi perubahan kebutuhan dalam prosesnya terutama dalam rencana anggaran sistem PBJ yang disebut Rencana Umum Pengadaan (RUP). Akibat sering terjadinya perubahan tersebut, peluang tingkat penyimpangan semakin tinggi. Terdapat 30- 50% kebocoran APBN dan APBD seperti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam kasusnya di Indonesia, sebuah kajian yang dilakukan Bank Dunia (Country Procurement Assesment Review) CPAR menyebutkan bahwa 10–50% pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia mengalami kebocoran (korupsi) (World Bank, 2001).

Mengantisipasi penyimpangan kebocoran itu, pemerintah memanfaatkan teknologi untuk reformasi administrasi dan pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas dengan menciptakan e-Government. Salah satu contoh penerapan e-Government adalah melalui e-Procurement. Hadirnya e-Procurement berhasil menekan biaya menjadi lebih murah, pelayanan publik yang lebih baik serta siklus pengadaan yang lebih pendek. Manfaat dari digunakannya e-Procurement di Indonesia adalah semakin baiknya tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, seperti yang ditegaskan oleh Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 107. Namun, ternyata masih ditemukan masalah-masalah krusial yang mempengaruhi keefektifan e-Government. Salah satunya yaitu selalu mengalami perubahan/perkembangan pada aplikasinya dari waktu ke waktu yang tidak diiringi oleh peningkatan pemahaman dan pengetahuan sumber daya atas aplikasi tersebut yang membuat para pelaku pengadaan mengalami kesulitan saat mengoperasikan e-Procurement karena kurangnya pelatihan secara berkala (Ada et al., 2020).

Kasus beberapa daerah di Indonesia seperti Bangka Belitung, Kabupaten Banyuasin, Sulawesi Selatan, Jawa tengah, dan daerah lainnya memiliki permasalahan dalam pelaksanaan implementasi e-Procurement yaitu kinerja para pihak pengelolaan e-Procurement masih kurang maksimal. Hal ini karena ketidakpahaman dan ketidaksiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan e-Procurement, walaupun sudah diadakan pelatihan namun tetap belum dapat memberikan hasil yang maksimal. Berdasarkan tingkat efisiensi, Provinsi Bangka Belitung dalam pelaksanaan e-Procurement hanya sebesar 5,77% pada tahun 2012, jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai angka 11,44% (Adrian et al., 2013; Aprizal & Purba, 2013; DP, 2016; Sani, 2011). Bahkan, Kota Surabaya sebagai pelopor pertama yang menerapkan e-Procurement sejak tahun 2004 masih mengalami masalah serupa, sehingga terpaksa kembali menggunakan cara-cara manual dalam teknis pelaksanaannya (Novitaningrum, 2014).

Jawa Barat mulai mengimplementasikan e-Procurement sejak tahun 2007, bahkan Jawa Barat pernah mendapatkan penghargaan selama 6 tahun berturut-turut dari 2010-2015 (Septiawan, 2018). Suksesnya sistem PBJ berbasis elektronik di Jawa Barat ini ternyata masih belum semua kabupaten/kota yang menggunakan e-Procurement sebab terbatasnya keterampilan pada sumber daya manusia sebagai tenaga teknis (Hapiyah, 2011). Berdasarkan data informasi yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi

Negara menyatakan hanya 37% Perangkat Daerah/Biro di Jawa Barat yang sudah mencapai secara penuh sesuai pagu anggaran perubahan bahkan kurang dari 50% dari 46 Perangkat Daerah/Biro di Jawa Barat. Penyebabnya antara lain karena terdapat kendala dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta tingkat kesiapan sumber daya manusia untuk memahami teknologi, sehingga ada barang/jasa yang belum atau tidak tepat waktu dalam penginputan ke sistem LPSE serta disebabkan karena proses alur website e-Procurement sering dibilang rumit dilihat dari lebih banyak tahapan yang harus dilakukan dibandingkan secara konvensional (Badan Siber dan Sandi Negara, 2011).

Beberapa dinas kembali menerapkan PBJ secara konvensional atau manual untuk memudahkan penyedia dan pembeli bertemu langsung ketika melaksanakan lelang (Prihastuti, 2015). Maka dari itu ada 29 Perangkat Daerah/Biro di Jawa Barat yang dinyatakan belum sesuai pagu anggaran perubahan karena kendala tersebut. Hal ini membuat beberapa Perangkat Daerah/Biro di Jawa Barat rendah dalam partisipasi penerapan e-Procurement. Salah satunya yaitu DISKOMINFO Jawa Barat yang masih kesulitan dalam proses pengolahan data penyedia (Azhar, 2011).

Jika dilihat dari permasalahan yang ada, implementasi e-Procurement di Jawa Barat belum berjalan secara efektif karena kurang didukung oleh kesiapan teknologi dan Sumber Daya Manusia. Kami ingin melihat tingkat kesiapan penggunaan teknologi dan Sumber Daya Manusia dalam menerapkan e-Procurement di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pengguna e-Procurement di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui hubungan antara Perceived Easy of Use (PEOU) terhadap Actual System Use (ATU); (2) Untuk mengetahui hubungan antara Attitude Toward Using (ATU) terhadap Behavioral Intention (BI); (3) Untuk mengetahui hubungan antara Behavioral Intention (BI) terhadap Actual System Use (AU).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dan deskriptif, dengan menguraikan fenomena yang terjadi sebelumnya menggunakan model Technology Acceptance Model (TAM). TAM merupakan sebuah model untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap teknologi. Model penelitian ini menggunakan 4 variabel yaitu Perceived Easy of Use, Attitude Toward Using, Behavioral Intention, dan dan Actual System Use. Dengan demikian penulis ingin melihat pengaruh konstruk TAM yang dapat mengukur penerimaan pengguna sistem e-Procurement di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kemudian data di analisis menggunakan Partial Least Square SEM (PLS SEM). PLS SEM merupakan salah satu metode analisis kuantitatif dari Structural Equation Modeling (SEM). SEM mampu menjelaskan keterkaitan variabel secara langsung maupun tidak langsung. Kelebihan menggunakan PLS SEM yaitu sampel yang digunakan boleh sedikit serta tidak memerlukan data dengan distribusi normal (Sitorus et al., 2015).

C. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini diawali dengan melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada 14 Dinas/OPD dan 100 responden sebagai partisipan. Kuesioner dibuat dengan konstruk *Technology Acceptance Model* (TAM) kemudian data diolah dan dihitung hasil rekapitulasi yang diperoleh dari kuesioner dengan SmartPLS lalu dianalisis statistika deskriptif untuk menjelaskan persentase distribusi frekuensi dari setiap variabel.

Tabel 1. Persentase Distribusi Jawaban Responden

Variabel Laten	Tidak Setuju	Setuju
<i>Perceived Ease of Use</i> (PEOU)	56%	44%
<i>Perceived Usefulness</i> (PU)	21%	79%

Tabel 1 Lanjutan. Persentase Distribusi Jawaban Responden

Variabel Laten	Tidak Setuju	Setuju
<i>Attitude Toward Using (ATU)</i>	20%	80%
<i>Behavioral Intention to Use (BI)</i>	24%	76%
<i>Actual Usage (AU)</i>	28%	72%

Sumber: Data Diolah Primer, 2022

Berdasarkan nilai persentase dari setiap variabel dan mengacu pada tabel 1 dapat dilihat bahwa variabel *Perceived Ease of Use (PEOU)* paling tinggi dalam kategori tidak setuju sebanyak 56%. Artinya masih ada pengguna yang kesulitan mengoperasikan *e-Procurement*. Tahap analisis statistika selanjutnya adalah dilakukan validasi terhadap *outer model* dan membuat diagram jalur sebelum pengujian hipotesis guna memprediksi hubungan antar variabel laten dalam *inner model*.

Evaluasi Outer Model

Outer Model merupakan model yang menghubungkan variabel laten dengan indikator- indikator pertanyaan. Pengujian *outer model* dilakukan dengan melihat nilai validitas, reliabilitas konstruk dan *Average Variance Extracted (AVE)*.

Tabel 2. *Outer Model* PLS SEM

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
ATU	0,916	0,959	0,922
AU	0,878	0,942	0,891
BI	0,919	0,961	0,925
PEOU	0,829	0,892	0,733
PU	0,936	0,959	0,887

Sumber: Data Diolah Primer, 2022

Setelah diestimasi, pada tabel 2 diatas artinya bahwa model dapat dilakukan evaluasi ke tahap selanjutnya dikarenakan pada eksekusi nilai korelasi pada tiap-tiap indikator memiliki *loading factor* dan nilai *Cronbachs alpha*>0.7 dari setiap konstruk, yang berarti telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas.

Evaluasi Inner Model

Evaluasi *inner model* berfungsi untuk mengevaluasi hubungan antar variabel laten. Evaluasi ini meliputi signifikansi hubungan jalur sebagaimana yang dihipotesiskan dan melihat nilai *R-Square*. Evaluasi hubungan jalur dilihat berdasarkan *path coefficients*. Berikut hasil dari analisis *bootstrapping* PLS SEM:

Tabel 3. *Bootstrapping* Path Coefficient

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values
ATU -> BI	0,330	0,326	0,147	2,240	0,026
BI -> AU	0,717	0,722	0,082	8,716	0,000
PEOU -> ATU	0,354	0,350	0,117	3,032	0,003
PEOU -> PU	0,302	0,313	0,114	2,655	0,008
PU -> ATU	0,379	0,371	0,135	2,803	0,005
PU -> BI	0,430	0,442	0,154	2,800	0,005

Sumber: Data Diolah Primer, 2022

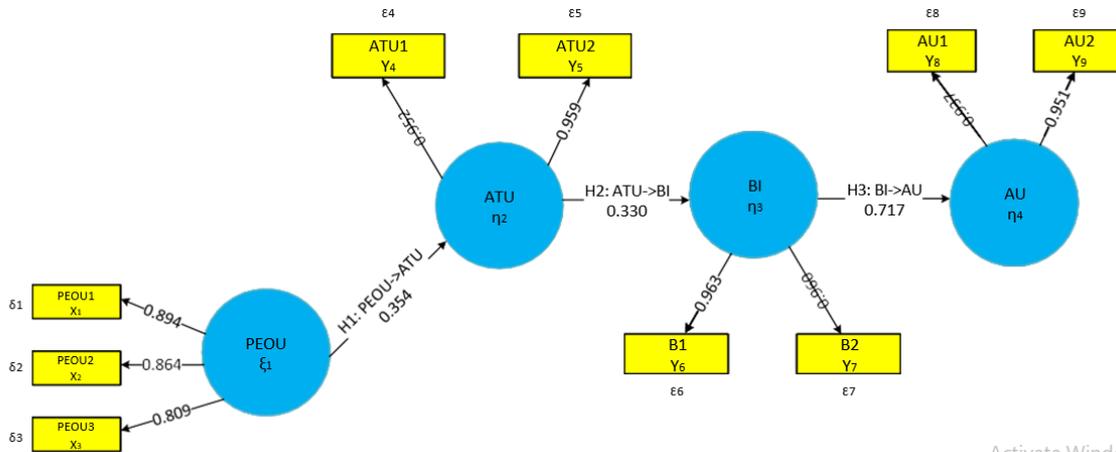
Penelitian ini dinyatakan diterima karena nilai *P-Values* < 0.05 dan nilai T-Statistik semua hipotesis >1,645.

Tabel 4. Koefisien Determinasi

	R Square
ATU	0,351
AU	0,513
BI	0,431
PU	0,091

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Tahap analisis selanjutnya yaitu menganalisis diagram jalur yang telah diolah dengan *SmartPLS* untuk mengetahui hubungan pengaruh langsung dan tidak langsung. Berikut merupakan diagram jalur yang merepresentasikan *outer model* dan *inner model*.



Gambar 1. Diagram Jalur *Outer Model* dan *Inner Model*

Sumber: Data Diolah Primer, 2022

Tabel 5. Simbol *Path Diagram*

Simbol	Deskripsi
	Variabel laten
	Indikator
	Pengaruh langsung
	Pengaruh tidak langsung

Perceived Ease of Use (PEOU) Terhadap Attitude Toward Using (ATU)

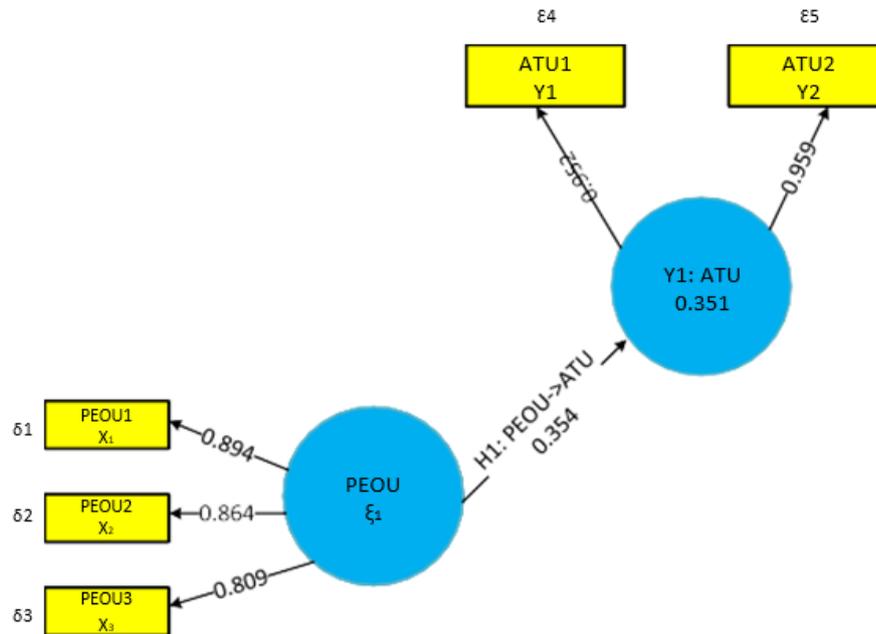
Permasalahan mengenai kesulitan pengguna mengoperasikan sistem, membuat seseorang mempertimbangkan keputusannya untuk menggunakan system tersebut. Terlebih kesulitan yang dirasakan pengguna mempengaruhi sikap sebesar 0.354. Artinya, persepsi kemudahan masih rendah dalam mempengaruhi sikap pengguna, namun jika dilihat dari manfaat maka pengguna akan mempertimbangkan untuk tetap menggunakan system. Terlihat dari hasil persentase kuesioner bahwa sebanyak 80% pengguna sudah memilih menggunakan *e-Procurement*, namun 20% pengguna lainnya lebih memilih kegiatan PBJ dilakukan secara manual, karena kesulitan dan pemanfaatan yang belum optimal seperti harga yang diajukan penyedia terlalu mahal dan masih sedikitnya vendor yang tersedia pada aplikasi *e-Procurement* membuat pengguna memilih belanja diluar aplikasi dan melakukan pencatatan secara manual. Apabila permasalahan tersebut dibiarkan maka akan mempengaruhi sikap pengguna dalam menggunakan *e-Procurement*. Seiring seseorang menyadari adanya manfaat pada sebuah system maka akan menunjukkan wujud nyata adopsi layanan ini dengan terus menggunakannya untuk berbagai transaksi barang/jasa secara *online*. Lebih jelasnya hubungan variabel dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Koefisien Jalur, Pengaruh Langsung, Pengaruh Total, dan Pengaruh Parsial Dari Attitude Toward Using (ATU)

Variabel	Koefisien Jalur	Y1	€2	
Pengaruh	Langsung	0,354	0,649	X1 -> Y1
	Total	0,354	$\sqrt{1 - 0,351} = 0,649$	
Pengaruh Parsial		-		35,1%

Keterangan: X1 = Perceived Ease of Use (PEOU) Y1 = Attitude Toward Using (ATU)

Hubungan kausal empiris antara *Perceived Ease of Use* (PEOU) terhadap *Attitude Toward Using* (ATU) dapat dijelaskan pada diagram jalur berikut ini:



Gambar 2. Diagram Jalur Hubungan Kausal Empiris (PEOU → ATU)

Attitude Toward Using (ATU) terhadap Behavioral Intention (BI)

Minat perilaku merefleksikan sebuah keputusan yang telah dibuat oleh seseorang yang berhubungan dengan ketertarikan seseorang dalam menggunakan sistem *e-Procurement*. Pada gambar 1 menunjukkan bahwa pengaruh Asikap pengguna terhadap minat pengguna sebesar

0.330 sesuai dengan temuan dilapangan bahwa ketika pengguna mengalami kesulitan dalam mengoperasikan *e-Procurement* maka pengguna mempertimbangkan kembali dan memilih pilihan alternatif lain untuk menyelesaikan pekerjaannya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara, Dinas/OPD mempunyai pilihan alternatif yaitu belanja di luar aplikasi seperti *e-commerce* dan belanja secara *offline*. Hal tersebut bisa menimbulkan masalah transparansi karena pengguna harus melakukan pencatatan secara manual. Lebih jelasnya hubungan variabel dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8. Koefisien Jalur, Pengaruh Langsung, Pengaruh Total, dan Pengaruh Parsial dari Behavioral Intention (BI)

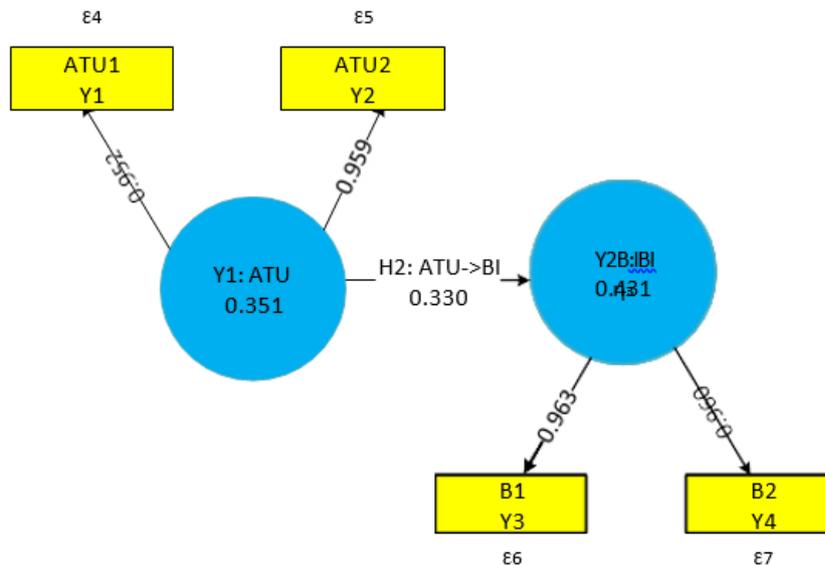
Variabel	Koefisien Jalur	Y2	€2	
Pengaruh	Langsung	0,330	0,569	Y1 -> Y2
	Total	0,330	$\sqrt{1 - 0.431} = 0,469$	
Pengaruh Parsial		-	-	43,1%

Keterangan:

Y1 = Attitude Toward Using (ATU)

Y2 = Behavioral Intention (BI)

Hubungan kausal empiris antara *Attitude Toward Using* (ATU) terhadap *Behavioral Intention* (BI) dapat dijelaskan pada diagram jalur berikut ini:



Gambar 3. Diagram Jalur

Behavioral Intention (BI) terhadap Actual Usage (AU)

Minat sebagai indikator penting dari keinginan untuk menggunakan sistem, Jika pengguna merasa puas dengan manfaat dan kemudahan yang diberikan sistem *e-Procurement* maka akan mempengaruhi minat pengguna untuk tetap menggunakan sistem tersebut. Pada gambar 3 terlihat bahwa minat pengguna terhadap pengguna nyata (AU) memiliki pengaruh langsung paling tinggi diantara variabel lainnya yaitu 0,717. Artinya kenyataan bahwa pengguna memiliki minat yang tinggi timbul karena adanya kemudahan dan manfaat yang dirasakan pengguna sehingga akan mendorong pengguna untuk terus mempertahankan penggunaannya(AU). Berdasarkan hasil presentase kuesioner sebanyak 72% pengguna menerima system *e- Procurement* dan 28% pengguna lainnya menolak hadirnya *e-Procurement*. Hasil temuan dilapangan menjelaskan alasan pengguna sebanyak 28% menolak hadirnya *e-Procurement* karena adanya kesulitan yang membuat pengguna kurang nyaman dalam penggunaan system tersebut.

Untuk meningkatkan kepuasan pengguna dalam menggunakan system *e-Procurement* diperlukan dukungan dari pemerintah untuk mendorong Dinas/OPD supaya mengikuti arahan yang diberikan oleh pemerintah demi terciptanya tata kelola PBJ yang lebih baik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2024 tentang pencapaian indikator tata kelola PBJ yang masih sangat perlu untuk ditingkatkan (Kalbarprov.go.id, 2022). Hal ini pun sejalan dengan pandangan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Kehutanan melalui hasil wawancara, bahwa peran pemerintah pusat penting dalam mempersiapkan kebijakan dan teknis pelaksanaan yang lebih matang serta mempersiapkan pelatihan dan pembinaan untuk Dinas/OPD bagi yang masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan *e-Procurement*, karena suksesnya sistem PBJ berbasis elektronik di Jawa Barat ini tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia yang kompeten. Hal ini juga menjadi temuan dalam penelitian Rahmawati dan Narsa bahwa semakin tinggi kecenderungan menggunakan sistem *e-Procurement* maka akan semakin tinggi pula kenyataan penggunaannya, meskipun pada penerapannya pengguna tidak selalu memberikan keinginan untuk terus menggunakan maupun merekomendasikan kepada pihak lain (Rahmawati & Narsa, 2019).

Demi terwujudnya keberhasilan pelaksanaan *e-Procurement* yang lancar, Dinas/OPD di Provinsi Jawa Barat berharap pemerintah pusat memberikan pelatihan dan pembinaan secara berkala, memperbaiki regulasi yang rumit, dan fitur sistem *e-Procurement* yang mudah dipahami, peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM sebagai pengguna maupun penyedia, serta memperbaiki sistem tender dengan menambah penyedia/penjual di sistem *e-Procurement* yang lebih murah dengan memasukan *e-commerce* seperti shopee, lazada, tokopedia, danlainnya. Lebih jelasnya hubungan variabel dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut:

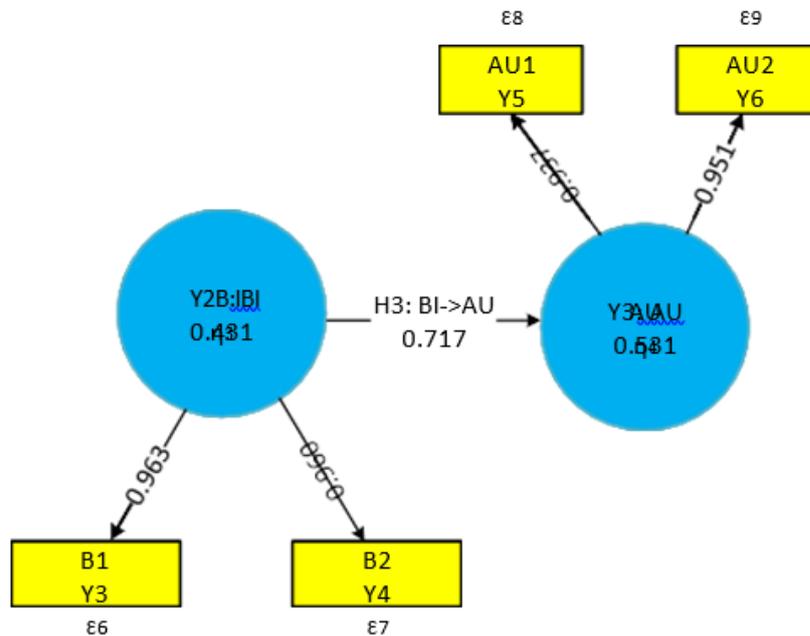
Tabel 9. Koefisien Jalur, Pengaruh Langsung, Pengaruh Total, dan Pengaruh Parsial Dari Actual Usage (AU)

Variabel	Koefisien Jalur	Y2	€2	
Pengaruh	Langsung	0,717	0,469	Y2 -> Y3
	Total	0,717	$\sqrt{1 - 0.531} = 0,469$	
Pengaruh Parsial		-	-	53,1%

Sumber: Data Diolah Primer, 2022

Keterangan: Y2 = Behavioral Intention to Use (BI) Y3 = Actual Usage (AU)

Hubungan kausal empiris antara *Behavioral Intention to Use (BI)* terhadap *ActualUsage (AU)* dapat dijelaskan pada diagram jalur berikut ini:



Gambar 4. Diagram Jalur Hubungan Kausal Empiris (BI → AU)

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi pengguna *e-Procurement* di Dinas/OPD Provinsi Jawa Barat yang diukur menggunakan model TAM (Technology Acceptance Model) diantaranya variabel Perceived Easy of Use (PEOU), Perceived Usefulness (PU), Attitude Toward Using (ATU), Behavioural Intention (BI), dan Actual Use (AU) menunjukkan pengaruh yang paling besar yaitu minat perilaku untuk menggunakan (BI) terhadap pengguna sistem secara aktual (AU). Sedangkan, dalam tingkat penerimaan minat perilaku (BI)

masih rendah sehingga mempengaruhi pengguna sistem secara aktual (AU). Namun demikian, pengguna sistem sebesar 69% telah menerima hadirnya e-Procurement yang artinya pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu meningkatkan lagi 31% tingkat penerimaan e-Procurement secara merata melalui perbaikan sistem dan meningkatkan kompetensi SDM guna mewujudkan optimalisasi e-Procurement di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan, dapat diperoleh strategi untuk meningkatkan penerimaan e-Procurement yaitu sebagai berikut: Melengkapi fitur sistem yang tidak lengkap dengan mengajak penjual/penyedia menjual produk UMKM dan Ultra Mikro (UMi) untuk mendaftarkan produknya agar tersedia di e-Procurement. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM agar dapat menguasai e-Procurement melalui pelatihan dan pembinaan secara berkala. Menyederhanakan regulasi yang rumit sehingga akan mendorong minat pengguna/penyedia menggunakan e-Procurement. Meningkatkan persaingan harga yang sehat untuk mendapatkan harga yang disepakati lebih efisien. Melakukan pengawasan dan peningkatan kapasitas jaringan untuk mengatasi masalah server down dan masalah keterlambatan input RUP (Rencana Umum Pengadaan) sehingga e-Procurement dapat berjalan lancar.

Daftar Pustaka

- Ada, Y., Kalangi, L., & Warongan, J. D. (2020). Analisis Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Pelaksanaan e-Procurement Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 11(2).
- Adrian, R., Lituhayu, D., & Djumiarti, T. (2013). Implementasi Pelaksanaan E-Procurement Dengan Prinsip-prinsip Good Governance Di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(3), 263–272.
- Aprizal, A., & Purba, J. R. T. (2013). Akuntabilitas pelayanan publik dalam pelaksanaan E-Procurement di Kota Pangkalpinang. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 17(1), 15–28.
- Azhar, F. (2011). E-Procurement Berbasis Intranet Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat. (*Doctoral Dissertation, Universitas Komputer Indonesia*).
- Azikin, A., Ismail, I., & Aminah, S. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah pada Kantor Inspektorat Kabupaten Soppeng. *Jurnal Ada Na Gau:Public Administration*, 2(1), 481–490.
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2011). *Dokumen Input SIRUP Perubahan*.
- DP, M. K. (2016). Pengaruh Pimpinan Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Pelaksanaan E-Procurement Di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 7(2), 44–51.
- Endah, K. (2018). Etika Pemerintahan dalam Pelayanan Publik. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 141–151.
- Hapih, Y. (2011). *Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement Government) Di Provinsi Jawa Barat*.
- Kalbarprov.go.id. (2022). *Perbaikan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Yang Bersih Melalui Smart E-Procurement*. <https://kalbarprov.go.id/berita/perbaikan-tata-kelola-pengadaan-barangjasa-yang-bersih-melalui-smart-e-Procurement.html>
- Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya). *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*.
- Prihastuti, N. E. (2015). *Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik (E-Procurement) Di Dinas Pekerjaan Umum. Provinsi Papua (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember)*.
- Purba, H. R. C., & Arifin, Z. (2020). Implementasi Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 (Studi di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 64–71.

- Rachmania, S. N. (2020). Kesalahan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Berimplikasi Tindak Pidana. *Jurist- Diction*, 3(3), 1123–1152.
- Rahmawati, R. N., & Narsa, I. M. (2019). Penggunaan e-learning dengan Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 6(2), 127–136.
- Sani, A. (2011). Evaluasi Penerapan E-Procurement pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. *Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin*.
- Septiawan, B. (2018). Keberhasilan implementasi sistem E-Procurement pada Pemerintah Daerah se- Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(1), 23–40.
- Sitorus, E., Rosidi, A., & Sunyoto, A. (2015). Analisis dan Evaluasi User Acceptance terhadap Penerapan E-Procurement di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Information Technology*, 3(1), 10–23.
- World Bank. (2001). *Indonesia Country, Procurement Assessment Report, Reforming the Public Procurement System*. Jakarta: East Asia and Pacific Region Operational Services Unit World Bank Office.